

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

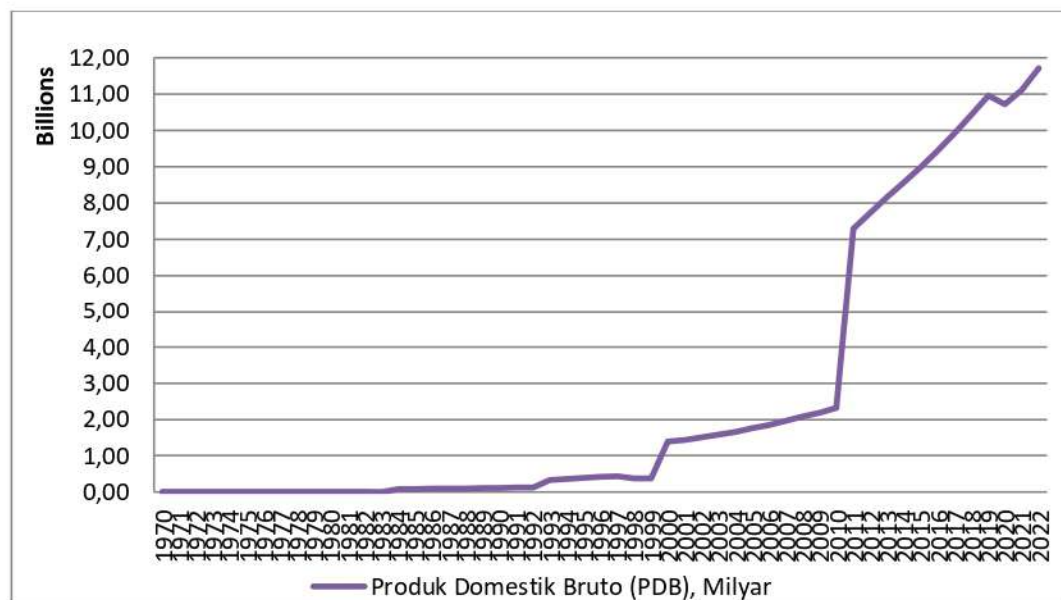
Pendapatan nasional merupakan ukuran keberhasilan pencapaian perekonomian suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara dapat dilihat dari jumlah pendapatan nasionalnya. Perhitungan pendapatan nasional sangat penting untuk mengetahui dan menelaah kondisi perekonomian suatu negara, karena perhitungan pendapatan nasional dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian, jasa atau yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut pula dapat ditentukan seberapa besar pengaruh dari berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, pertambangan dan lainnya (Budiman, 2013).

Menurut Kementerian Keuangan (2023), pendapatan nasional Indonesia menunjukkan tren positif dan belanja negara semakin optimal. Realisasi pendapatan nasional Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 103,66 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sisi lain, belanja negara mencapai 84,55 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya pertumbuhan ekonomi. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan tingkat konsumsi, serta menyebabkan peningkatan investasi. Sektor terbesar penyumbang bagi pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan asuransi dan pertambangan serta sektor lainnya.

Menurut Andinata et al. (2018), pendapatan nasional merupakan nilai yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Dalam hal ini produk domestik

bruto sebagai proksi untuk menentukan pendapatan nasional. Pada umumnya, perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Bahkan Bank Dunia menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang melalui pengelompokan besarnya produk domestik bruto.

Pendapatan nasional Indonesia melalui Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1970-2022 dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1. 1 PDB Harga Konstan di Indonesia Tahun 1970-2022

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 1970 sampai 2022. Produk domestik bruto periode 1970 sampai 2010 menunjukkan peningkatan yang cenderung lambat. sejak tahun 1970-an, Indonesia mengalami volatilitas pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi global dan peristiwa internal seperti krisis politik dan konflik sosial membuat lambatnya pertumbuhan produk domestik bruto pada periode tersebut. Namun,

pada tahun 1998 produk domestik bruto mengalami penurunan. Berdasarkan media CNBC Indonesia faktor yang menyebabkan turunnya angka produk domestik bruto pada tahun tersebut dikarenakan terjadinya krisis moneter yang membuat kontraksinya komponen produk domestik bruto seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor-impor.

Peningkatan produk domestik bruto secara signifikan terjadi pada tahun 2011. Menurut Indonesia Investments faktor yang berkontribusi pada peningkatan signifikan tersebut adalah meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya daya beli konsumen dan ledakan harga komoditas yang terjadi pada tahun 2000-an (*2000s commodities boom*). Setelah itu, pada periode 2012 sampai 2019 produk domestik bruto terus meningkat secara signifikan. Menurut Sari (2021), peningkatan harga BBM dipengaruhi secara signifikan oleh sektor industri, khususnya subsektor industri pengolahan non-migas (manufaktur). Setiap tahunnya, sektor industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia, menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Namun, pada tahun 2020 ketika terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia produk domestik bruto mengalami penurunan. Setelah itu, produk domestik bruto kembali menunjukkan peningkatan secara signifikan sampai tahun 2022, hal ini mencerminkan perekonomian yang lebih kuat.

Peningkatan pendapatan nasional dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mempengaruhi harga bahan bakar minyak yaitu melalui subsidi. Isu alokasi anggaran subsidi energi, terutama subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), selalu menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Indonesia yang semakin besar terhadap impor BBM, sebagai dampak dari transisi negara menjadi net importir BBM sejak tahun 2003. Bahan Bakar Minyak (BBM) memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional (Kholiq, 2015).

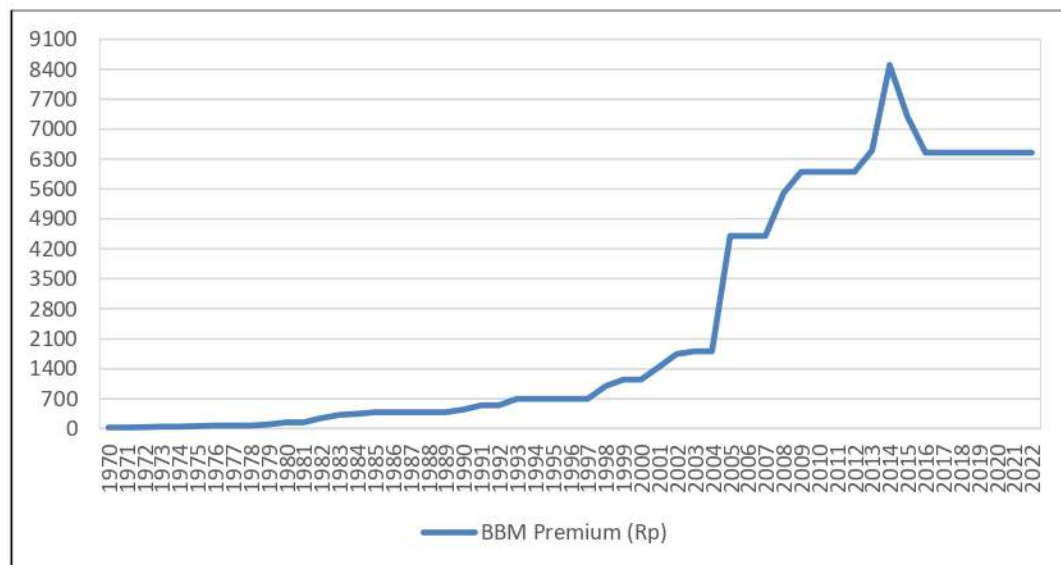
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disebabkan oleh beberapa faktor, terutama meningkatnya harga minyak mentah global dan Indonesian *Crude Price* (ICP). Hal ini berdampak pada peningkatan beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemberian subsidi BBM ternyata sering kali tidak tepat sasaran. Menurut data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dari total kompensasi BBM sebesar 93,5 triliun rupiah, sekitar 80,4 triliun rupiah dinikmati oleh rumah tangga, sementara 13,1 triliun rupiah dinikmati oleh dunia usaha. Dari jumlah yang dinikmati rumah tangga, hanya sekitar 16,1 triliun rupiah yang sampai ke rumah tangga yang kurang mampu (Wibawa, 2022).

Hal ini juga mendorong pertimbangan apakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah didistribusikan secara merata atau tidak. Subsidi yang diberikan menguntungkan mereka yang mampu membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga lebih tinggi. Padahal jika pendapatan masyarakat rendah, tetapi harga sandang, pangan, perumahan dan juga konsumsi energi meningkat, maka dukungan ini akan meringankan masyarakat, karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang ditanggung dan dikelola oleh pemerintah. Namun, karena harga BBM yang relatif murah, banyak masyarakat yang tidak bijak dalam menggunakan BBM sehingga konsumsi pun meningkat dan

menyebabkan kelangkaan BBM. Dengan begitu, mau tidak mau pemerintah akan mulai mengimpor minyak dalam jumlah besar dari luar negeri, padahal Indonesia merupakan salah satu negara pemasok utama minyak (Suryadi, 2015).

Harga minyak dunia seiring dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada perekonomian negara, terjadinya *shock oil* positif atau negatif mempunyai implikasi terhadap aktivitas perekonomian negara, baik itu negara pengekspor minyak maupun negara pengimpor minyak. Dengan demikian harga minyak yang lebih tinggi akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan harga minyak yang rendah akan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit fiskal (Al-Janabi & Abboud, 2021).

Perkembangan harga BBM (Premium) di Indonesia tahun 1970-2022 bisa dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber : Kementerian ESDM (2024)

Gambar 1. 2 Harga BBM (Premium) di Indonesia Tahun 1970-2022

Berdasarkan gambar 1.2 perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Indonesia dari tahun 1970 hingga 2022 menunjukkan beberapa pola

yang signifikan. Selama periode 1970 hingga 2004, harga BBM relatif stabil dan rendah. Menurut Setiono, (2014) mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan subsidi besar-besaran untuk BBM, yang membuat harga di dalam negeri tetap rendah. Pada masa itu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dan termasuk anggota OPEC. Namun, sejak tahun 2004, Indonesia beralih menjadi net importir minyak untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Peningkatan harga BBM secara signifikan terjadi pada tahun 2005. Menurut Kementerian ESDM, lonjakan harga tersebut disebabkan oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi. Tujuan dari penyesuaian ini adalah agar dana subsidi dapat dialihkan untuk program-program produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Setelah tahun 2005, harga BBM mengalami fluktuasi yang cukup tinggi hingga tahun 2022. Menurut CNBC Indonesia, menjelaskan bahwa fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan harga minyak dunia, krisis ekonomi global, dan kebijakan pemerintah terkait subsidi. Pemerintah juga berupaya mengendalikan kenaikan harga BBM melalui pengurangan konsumsi.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mempengaruhi angka inflasi. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak terhadap naiknya biaya transportasi dan biaya produksi di industri sehingga akan menyebabkan meningkatnya tingkat inflasi di semua sektor ekonomi (Harunurasyid, 2013). Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam makro ekonomi. Tingkat pertumbuhannya selalu dijaga agar tetap rendah dan stabil agar

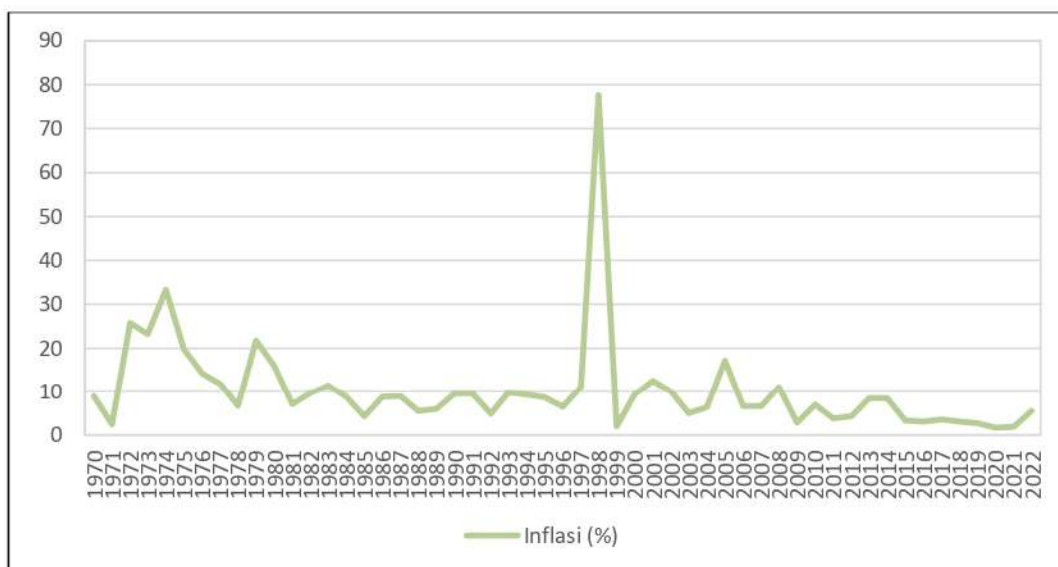
tidak menimbulkan penyakit ekonomi makro yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi disebabkan oleh jumlah uang beredar secara berlebihan (Singh, 2018).

Menurut Sumarto (2022), inflasi saat ini jauh lebih berat dan lebih dalam. Selain harga komoditas yang tinggi, inflasi juga disebabkan oleh ketidakseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Konsumsi masyarakat yang meningkat menciptakan kelebihan permintaan yang mendorong naiknya harga barang dan jasa. Tingkat inflasi yang serius saat ini memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif dengan partisipasi seluruh otoritas kebijakan, yang berarti bahwa fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak akan mampu meringankan dampak inflasi ganda. Inflasi yang terjadi saat ini terutama berasal dari sektor riil dan ketidakpastian geopolitik global berada di luar yurisdiksi BI. Lambatnya kinerja sisi penawaran akibat *scar effect* dan kenaikan harga komoditas global membutuhkan intervensi fiskal yang lebih besar. Kebijakan fiskal harus benar-benar mengedepankan peran dan fungsinya, terutama perannya sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi.

Menurut Rahardja & Manurung dalam Silitonga (2021), tingkat inflasi yang tinggi akan memperburuk nilai produk domestik bruto suatu negara. Inflasi menggoyahkan perekonomian dengan menurunkan ekspektasi pelaku ekonomi. Inflasi kronis meningkatkan ekspektasi tentang harga berkelanjutan untuk barang dan jasa. Dari sudut pandang konsumen, penilaian ini mengarah pada peningkatan lebih lanjut dalam pembelian barang dan jasa. Konsumen didorong oleh perkiraan ini untuk membeli lebih banyak barang dan jasa dari yang seharusnya. Tujuannya

adalah untuk menghemat pendapatan konsumen. Selain itu, ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa menggoda produsen untuk menunda penjualan guna mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Pasokan barang dan jasa berkurang. Penjelasan di atas jelas menunjukkan pengaruh inflasi terhadap PDB.

Perkembangan inflasi di Indonesia tahun 1970-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1. 3 Inflasi di Indonesia Tahun 1970-2022

Berdasarkan gambar 1.3 fluktuasi inflasi di Indonesia dari tahun 1970 hingga 2022 menunjukkan pola yang signifikan. Selama periode 1970 hingga 1997, inflasi mengalami penurunan yang substansial, meskipun terdapat lonjakan inflasi pada waktu-waktu tertentu. Menurut Suseno & Astiyah (2009), menjelaskan bahwa kebijakan stabilitas ekonomi yang diterapkan sejak tahun 1968, termasuk kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, penyesuaian harga barang dan jasa, serta sistem baru dalam pengadaan pangan oleh BULOG, berkontribusi

besar terhadap penurunan inflasi pada periode tersebut. Namun, pada tahun 1998, inflasi melonjak tajam akibat Krisis Keuangan Asia. Berdasarkan media CNBC Indonesia, krisis ini dimulai ketika Thailand meninggalkan kebijakan nilai tukar tetap terhadap dolar AS pada Juli 1997, yang menyebabkan banyak perusahaan gagal bayar akibat melemahnya mata uang. Krisis tersebut menyebar ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.900 per dolar AS. Inflasi mencapai puncaknya pada tahun 1998, tetapi menurun drastis pada tahun 1999 berkat perbaikan pasokan bahan makanan, produksi sektoral, dan distribusi barang-barang yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi keamanan.

Selama periode 2000 hingga 2022, inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi tetapi pada umumnya dapat dipertahankan pada tingkat yang relatif rendah. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam inflasi aktual, target inflasi tetap stabil. Sebagai contoh, meskipun target inflasi tahun 2001 adalah 4% - 6%, inflasi aktual mencapai 12.55%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi dapat bervariasi, upaya pengendalian inflasi oleh otoritas moneter seperti Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga inflasi tetap pada tingkat yang relatif rendah.

Tingkat inflasi yang tinggi atau tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut atau mempertahankan karyawan. Perusahaan mungkin menjadi lebih hati-hati dalam mengambil risiko pengeluaran untuk tenaga kerja baru, yang dapat berdampak pada tingkat pengangguran.

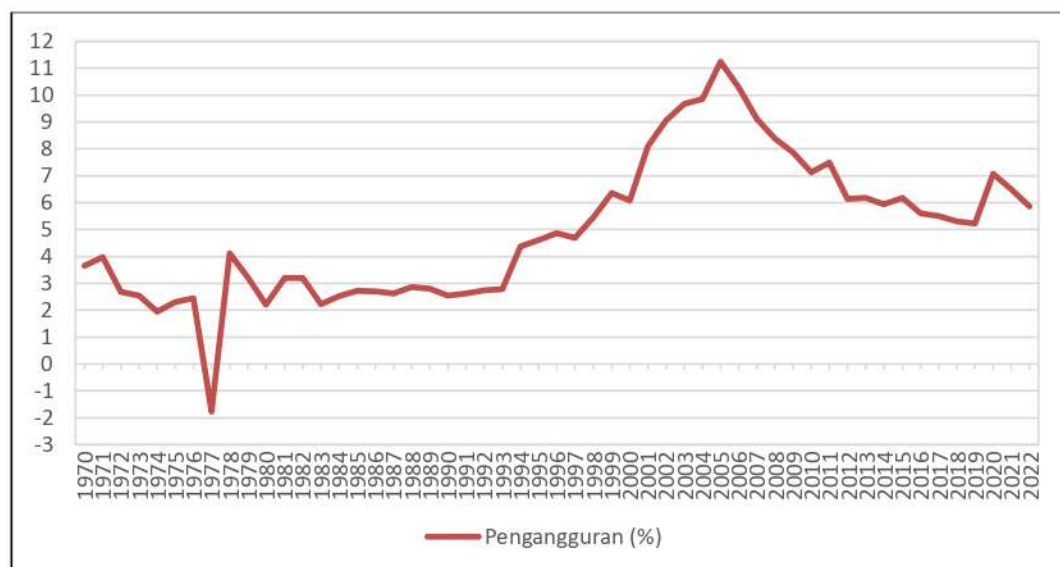
Globalisasi, teknologi dan digitalisasi yang disruptif, perubahan cara hidup dan preferensi konsumen menyebabkan lapangan kerja dan profesi berubah dengan cepat, dan laju kemajuan pun semakin cepat. Hal ini memberikan peluang yang luas, dan juga risiko. Kebijakan pemerintah harus fokus pada penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan kerja lulusan dibandingkan mempertahankan sumber daya yang pada akhirnya akan berlebihan. Harus menata cara yang komprehensif dan mengakar dalam menangani peningkatan kemampuan. Kemampuan beradaptasi, fleksibilitas dan rasa lapar untuk belajar harus ditanamkan pada apa yang diajarkan dan bagaimana menampilkannya melalui kerangka pelatihan. Saat ini, setiap negara berkembang menghadapi masalah pengangguran di kalangan lulusannya. Layaknya pembangunan dan perekonomian suatu negara terutama terpengaruh jika pengangguran tinggi (Seng, 2018).

Menurut Purboningrum (2022), pengangguran di Indonesia memang cenderung menunjukkan tren menurun lebih dari satu dekade terakhir. Namun, dengan tren penurunan ini bukan berarti pengangguran sudah tidak lagi menjadi isu ekonomi sekaligus isu sosial di tengah masyarakat Indonesia. Di samping menurunnya angka pengangguran tersebut masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dan terkendala untuk mendapatkan pekerjaan yang layak demi mendapatkan hidup yang sejahtera. Dalam hal ini, tentu masih adanya ketidakefisienan kebijakan dan program kerja untuk memberantas pengangguran. Salah satu alasan mengapa angka pengangguran di Indonesia masih tinggi walaupun menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun adalah kurang tersedianya lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja yang siap untuk bekerja tidak

sebanding dan cenderung melebihi lapangan kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan inilah menyebabkan banyak ketimpangan dan mengakibatkan banyak masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran yang tinggi berarti banyak sumber daya manusia yang tidak produktif atau *underutilized*. Orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan tidak memberikan kontribusi terhadap PDB perekonomian. Oleh karena itu, pengangguran mempengaruhi produksi barang dan jasa, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu negara mempertahankan seluruh pekerjanya tetap bekerja, maka PDB negara tersebut akan lebih tinggi (Pascual et al. 2020).

Perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1970-2022 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1970-2022

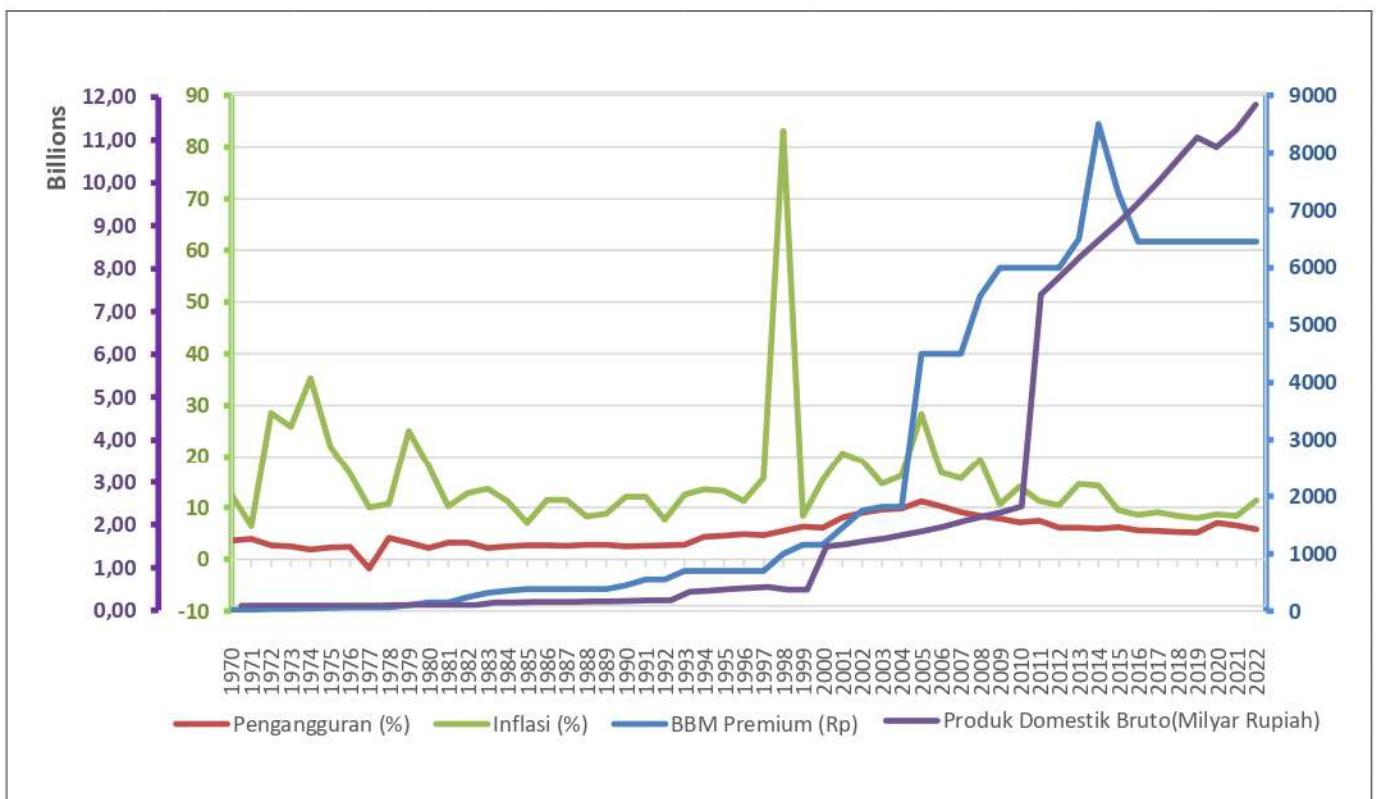
Berdasarkan gambar 1.4 fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia dari 1970 hingga 2022 menunjukkan beberapa pola signifikan. Selama periode 1971 hingga 1993, tingkat pengangguran relatif stabil. Menurut Harfina (2009), stabilitas ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia cenderung tidak mengalami pengangguran dalam jangka panjang seperti di negara maju, di mana pengangguran dapat memperoleh tunjangan dari pemerintah. Di Indonesia, banyak orang merasa terdorong untuk bekerja demi menyokong kehidupan keluarga mereka. Menganggur sepenuhnya dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tidak produktif dan memerlukan dukungan finansial, sehingga hanya sebagian kecil angkatan kerja yang mampu menganggur. Selain itu, banyaknya peluang kerja di sektor informal di Indonesia memungkinkan orang untuk mendapatkan pekerjaan meskipun dengan jam kerja dan pendapatan yang rendah.

Fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia periode 1994 sampai 2005 cenderung meningkat cukup tajam. Menurut Zamzami et al. (2020), menjelaskan bahwa fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah populasi yang tidak dapat terserap dalam lapangan kerja, sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Kenaikan pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005, di mana menurut media Detikfinance, penyebab utamanya adalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di sektor industri padat karya, seperti industri kecil, nelayan, dan usaha kecil yang bergantung pada BBM.

Tingkat pengangguran di Indonesia periode 2006 sampai 2022 menunjukkan cenderung menurun. Menurut Ragimun (2010), menyebutkan bahwa

penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja seiring dengan program dan kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan investasi melalui perbaikan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya.

Secara keseluruhan produk domestik bruto, harga BBM, inflasi, dan pengangguran dapat dilihat pola pergerakannya pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian ESDM (2024)

Gambar 1. 5 Harga BBM, Inflasi, Pengangguran, dan Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 1970-2022

Berdasarkan Gambar 1.5 yang menunjukkan keterkaitan antara harga BBM, inflasi, pengangguran dan produk domestik bruto di Indonesia dalam rentang waktu 1970 sampai 2022. Dapat dilakukan analisis mengenai keterkaitan produk domestik bruto dengan harga BBM, inflasi dan pengangguran.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 1970 sampai 2022. Ketika harga BBM naik akan berdampak langsung terhadap biaya produk dalam berbagai sektor industri (Amelia et al., 2023). Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak akan mendorong kenaikan biaya produksi barang-barang yang dihasilkan dengan bahan bakar minyak, kemudian kenaikan biaya produksi akan menaikkan harga jual barang-barang tersebut sehingga akan meningkatkan produk domestik bruto dari semua sektor. Hal tersebut sesuai dengan pergerakan data harga bahan bakar minyak yang semakin tinggi diikuti oleh peningkatan produk domestik bruto. Namun yang menarik pada tahun 1998 ketika harga bahan bakar minyak menunjukkan kenaikan akan tetapi produksi domestik bruto mengalami penurunan.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa sehingga membuat konsumen akan mengurangi konsumsinya dan dapat terjadi inflasi baik dari sisi *cost push inflation* dan *demand full inflation* (Masrum, 2014). Terlihat inflasi menunjukkan volatilitas yang signifikan selama periode 1970 sampai 2022. Hubungan Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) kompleks, inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat, mengurangi nilai uang dan mengganggu aktivitas ekonomi sehingga ini berdampak negatif pada PDB karena konsumen mengurangi pengeluaran mereka. Terlihat pada tahun 1998 ketika inflasi yang tinggi produk domestik bruto mengalami penurunan. Inflasi yang stabil dan moderat, disisi lain, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kepastian bagi perusahaan dan konsumen dalam perencanaan

jangka panjang. Namun pada tahun 2020 ketika inflasi yang menunjukkan rendah akan tetapi produk domestik mengalami penurunan.

Tingkat pengangguran menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 1970 sampai 2022. Hubungan pengangguran dan PDB adalah kompleks, tingkat pengangguran yang tinggi dapat berarti bahwa pemborosan sumber daya dan potensi yang ada (Khodijah, 2017). Hal ini dapat mengurangi PDB karena potensi produksi tidak dimanfaatkan. Selain itu tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi dan oleh karena itu dapat merusak potensi PDB. Hal ini terlihat pada tahun 2020 ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan diikuti produk domestik bruto yang mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2005 ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan tertinggi, produk domestik bruto justru menunjukkan kenaikan.

Secara keseluruhan keterkaitan antara produk domestik bruto dengan harga bahan bakar minyak, inflasi dan tingkat pengangguran adalah kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan dan kondisi pasar. Analisis ekonomi yang cermat diperlukan untuk memahami bagaimana faktor faktor ini saling mempengaruhi dalam konteks ekonomi tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas. Maka penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Harga Bahan Bakar Minyak dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Pendapatan Nasional Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang dapat penulis munculkan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nasional Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pendapatan nasional Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap pendapatan nasional Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh harga bahan bakar minyak, inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pendapatan nasional Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang telah di paparkan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nasional Indonesia
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pendapatan nasional Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap pendapatan nasional Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh harga bahan bakar minyak, inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pendapatan nasional Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang di harapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Setelah memahami analisis dampak harga bahan bakar minyak dan variabel makroekonomi terhadap pendapatan nasional, diharapkan secara akademis dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai hubungan tersebut, serta memberikan bahan kajian dalam mata kuliah ekonomi makro.
2. Bagi pihak lain atau peneliti di masa depan, skripsi ini dapat menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian serupa dengan pendekatan dan cakupan yang berbeda, serta memperkaya literatur di kalangan akademisi Universitas Malikussaleh, khususnya Fakultas Ekonomi & Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Setelah memahami analisis dampak harga bahan bakar minyak dan variabel makroekonomi terhadap pendapatan nasional, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk evaluasi kebijakan dan perencanaan strategis di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan informasi tambahan, yang berguna sebagai referensi atau pertimbangan lebih lanjut bagi pihak yang membutuhkan, seperti perusahaan maupun masyarakat umum.